



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

# **RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN**

**Oleh :  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta**

*Jakarta, Agustus 2018*



# VISI JAKARTA 2017 - 2022



“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya  
yang Warganya terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban,  
Keadilan dan Kesejahteraan  
bagi Semua”



# MISI JAKARTA 2018 - 2022

1. Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan **HUMANIS** dan **MENGAYOMI**, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial.
2. Membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial.
3. Membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota.
4. menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.







# 4 Tingkat Partisipasi Publik

**Sosialisasi**

**Konsultasi**

**Partisipasi**

**Kolaborasi**







# 4 Tingkat Evolusi Kota

## CITY 1.0

Pemerintah kota sebagai **administrator**.  
Warga sebagai **penghuni**.

## CITY 2.0

Pemerintah kota sebagai **penyedia jasa**.  
Warga sebagai **konsumen**.

## CITY 3.0

Pemerintah kota sebagai **fasilitator**.  
Warga sebagai **partisipan**.

## CITY 4.0

Pemerintah kota sebagai **kolaborator**.  
Warga sebagai **ko-kreator**.



# PERATURAN YANG HARUS DIKUASAI

---

- UU No. 5 Tahun 2014
- PP No. 11 Tahun 2017
- PP No. 100 Tahun 2000
- PP No. 53 Tahun 2010
- Peraturan Gubernur tentang TKD
- Peraturan Gubernur tentang Kepangkatan
- Peraturan Gubernur tentang Pegawai Tugas Belajar



# PENGELOLAAN SDM

- Pengelolaan SDM berbasis kompetensi
- System pengelolaan SDM berbasis Merit Sistem :

**Kebijakan dan Manajemen ASN yang *berdasar kan Pada Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja* secara adil dan *wajar tanpa membedakan* latar belakang Politik, Ras, Warna Kulit, Agama, Asal-Usul, Jenis Kelamin, Status Pernikahan, Umur atau Kondisi Kecacatannya (*Sumber : UU Nomor 5 Tahun 2014*)**

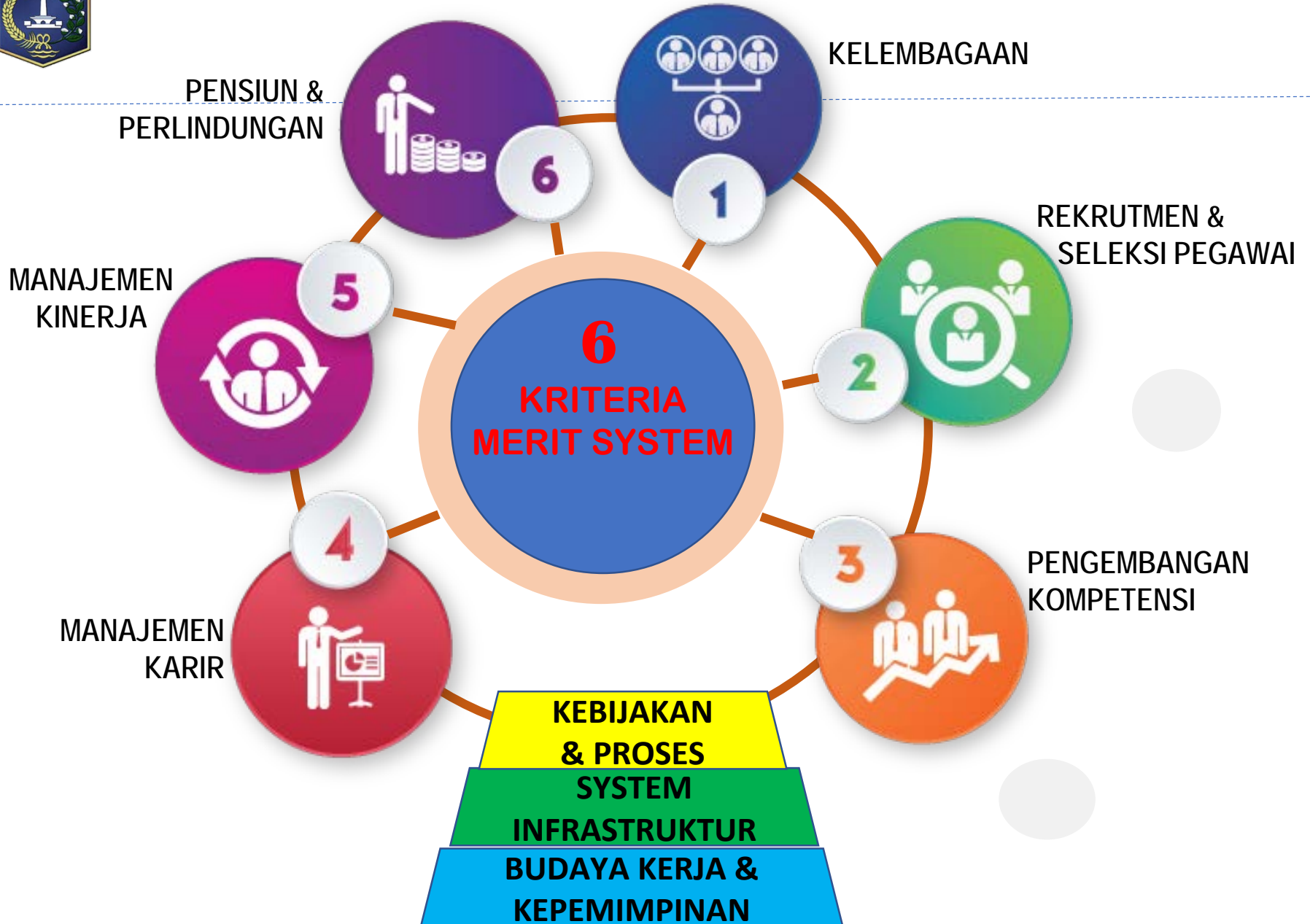


# MEMBANGUN SISTEM MERIT

## MEMBANGUN SISTEM MERIT ASN









# **TERIMA KASIH**

**BPSDM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**